

**LAPORAN HASIL
PENELITIAN HIBAH BERSAING XI
TAHUN KE-1
Tahun Anggaran 2003/2004**



**PRAKTEK *VOLUNTARY DISCLOSURE* DALAM
LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI PENDUKUNG
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA**

***Ketua Peneliti:*
Dr. Arifin, M.Com., Hons., Akt.
Fakultas Ekonomi**

**Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan
Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Hibah Bersaing XI Nomor : 242/P4T/DPPM/PHBXI/III/2003,
tanggal 28 Maret 2003**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOVEMBER 2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

RINGKASAN

Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu isu hangat yang menarik perhatian para ekonom dan pelaku bisnis di Indonesia saat ini. GCG adalah merupakan proses dan struktur pengelolaan bisnis dan urusan perusahaan lainnya dalam rangka meningkatkan kemakmuran (*wealth*) dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan mewujudkan nilai pemegang saham (*shareholders*) yang optimal dalam jangka panjang. Terdapat empat prinsip dasar praktek *good corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggungjawab. Keempat prinsip dasar ini harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan perusahaan. Salah satu cara untuk mewujudkan prinsip transparansi, manajemen perusahaan menyajikan informasi tambahan bagi para pemakai dalam laporan tahunannya melalui praktek *voluntary disclosure*.

Tujuan penelitian tahun pertama ini adalah mengidentifikasi informasi yang bersifat *voluntary* yang biasanya dipraktikkan oleh perusahaan yang telah go-public di Indonesia dalam laporan tahunannya. Tiga tahap analisis dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. Analisis yang pertama adalah melakukan studi komparasi untuk mengidentifikasi item-item yang tergolong *voluntary* dengan mengacu pada hasil penelitian terdahulu (misal Firth, 1979; Chow & Wong-Boren, 1987; Cooke, 1991; Hossain et al., 1994; and Meek & Roberts, 1995). Hasilnya diperoleh 95 informasi yang tergolong *voluntary*. Analisis selanjutnya adalah menghilangkan item yang bersifat *mandatory disclosure* dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM dan Ikatan Akuntan Indonesia. Analisis tahap dua ini menghasilkan 16 item dihapus sehingga tinggal 79 item. Selanjutnya 79 item tersebut divalidasi dengan melakukan diskusi dengan para praktisi dan akademisi untuk menetapkan daftar final item yang bersifat *voluntary*. Akhirnya dari analisis ini diperoleh 61 item yang bersifat *voluntary* yang nantinya ke 61 informasi ini akan dipakai sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian tahun berikutnya.

SUMMARY

Good Corporate Governance (GCG) is one of current issues that attracts businessmen and economist in Indonesia. GCG relates to a process and a structure of business management to increase shareholders' wealth for the long periods. There are four basic principles of GCG practices, these are : (1) transparency, (2) accountability, (3) fairness, and (4) responsibility. For corporate management purposes, these principles should be referred. In order to apply transparency principle, management of companies present additional information to users in their annual reports through voluntary disclosure practices.

The objective of this research is to determine the voluntary disclosure items that are commonly presented in the Indonesian companies' annual reports. The analysis of how the objective is achieved is using three steps. Firstly, the number of voluntary disclosure items was gathered through previous studies (for example Firth, 1979; Chow & Wong-Boren, 1987; Cooke, 1991; Hossain et al., 1994; and Meek & Roberts, 1995). A preliminary list of 95 discretionary disclosure items was derived. Secondly, to identify the voluntary items, items classified as mandatory were eliminated by referring to the disclosure requirements of the Indonesian Accounting Standards (1995) and the BAPEPAM's regulations (1996). In order to avoid bias and to provide a comprehensive list of voluntary disclosure items, the items to be selected should be covered in previous research studies, and the item is not mandated or regulated by the Indonesian Accounting Standard (1995) and the BAPEPAM's regulation (1996). From 95 preliminary items, 16 items that were eliminated were either mandatory disclosures or irrelevant in the Indonesian context. Finally, discussion with several managing partners of Certified Public Accountants (CPA) firms, accounting academicians, and officials of the Jakarta Stock Exchange was held to verify the list of voluntary disclosure items. From this discussion, 18 items were eliminated since these items have been mandated by additional BAPEPAM's regulation. Their feedback was used to compile or refine a final list of 61 items. These items become a basis for conducting continuing research.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah s.w.t. yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kami untuk menyelesaikan penelitian kami dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak, baik pihak lembaga maupun perorangan. Pada kesempatan ini, rasa terima kasih kami ucapkan untuk :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberi kesempatan, kepercayaan, dan pendanaan kepada kami sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro beserta stafnya yang telah membantu kelancaran administrasi dan dorongan moril maupun materiil untuk selesainya penelitian ini.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana sehingga penelitian tahap pertama ini dapat selesai dengan baik.
4. PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang telah membantu kami dalam penyediaan data laporan tahunan beserta aturan-aturan BAPEPAM sebagai bahan acuan dalam penelitian ini.
5. Adik-adik Mahasiswa staf Pojok Bursa Efek Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang dengan senangnya menyediakan data dan informasi yang kami perlukan.
6. Rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang telah berjasa untuk terselesaikannya penelitian hibah bersaing tahap satu ini.

Akhirnya besar harapan kami hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu acuan dan dapat dipakai sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, 13 Oktober 2003.

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY.....	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN KE-1.....	3
III. TINJAUAN PUSTAKA	3
IV. METODE PENELITIAN	8
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	10
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	24
VII. RENCANA PENELITIAN TAHAP II (2004-2005)	25
A. Tujuan Khusus	25
B. Metode	25
C. Jadwal Kerja	27
PUSTAKA ACUAN	28

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Alokasi Waktu Kegiatan Penelitian Hibah Bersaing Tahun ke-1 Sesuai Dengan Usulan (10 bulan)	9
Tabel 2	Alokasi Waktu Kegiatan Penelitian Tahun Ke-1 (8 bulan)..	9
Tabel 3	Susunan Anggota Tim Peneliti	10
Tabel 4	The List of Voluntary Disclosure Items (Based on Prior Research)	12
Tabel 5	Jenis/nama Informasi yg Tergolong Dalam Voluntary Disclosure	17
Tabel 6	Hasil Final Jenis/nama Informasi yg Tergolong Dalam Voluntary Disclosure	21
Tabel 7	Alokasi Waktu Penelitian Tahap II (10 bulan)	27

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.2. Tentang Laporan Tahunan
- Lampiran 2 Kode dan Nama Perusahaan 'Go-Public' per 30 September 2003.
- Lampiran 3 Contoh Laporan Tahunan 2002 :
PT. ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk.

I. PENDAHULUAN

Perusahaan bisnis menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam rangka memberikan informasi atas hasil operasinya selama satu tahun kepada berbagai pihak. Pihak-pihak pemakai laporan keuangan diantaranya adalah para investor, kreditur, instansi pemerintah, perbankan, dan pemakai lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Masing-masing pemakai laporan tersebut memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga informasi yang bersifat umum harus disajikan dalam laporan keuangan guna menjaga kenetralan dari tujuan pelaporan. Disinilah muncul kepentingan yang berlawanan antara pemakai, di satu pihak, yang ingin mengetahui secara lengkap segala informasi yang ada di dalam perusahaan tempat mereka berinvestasi dengan pihak manajemen, di pihak lain. Pihak manajemen memiliki keterbatasan dalam penyajian karena efek yang negatif bila semua informasi diungkap dalam laporan keuangan. Manajemen perusahaan yang bersangkutan tentu memiliki itikad baik untuk memberikan laporan keuangan yang lengkap kepada pemakai, namun mereka pun juga harus sadar bahwa para pesaing juga membutuhkan informasi tersebut guna menyusun strategi dalam persaingan bisnis di masa mendatang.

Realitas di atas mempunyai implikasi terhadap praktek pelaporan keuangan di Indonesia. Secara umum praktek penyajian informasi dalam laporan keuangan selama ini mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 1994 yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kemudian bagi perusahaan yang go public, pihak BAPEPAM telah mengatur tentang format dan isi laporan keuangan termasuk informasi yang wajib diungkapkan melalui aturan nomor 38/1996. Dalam aturan tersebut intinya mengharuskan perusahaan-perusahaan public untuk mengungkapkan informasi penting didalam laporan keuangannya yang bisa mempengaruhi operasi perusahaan di masa mendatang. Informasi tersebut antara lain, perubahan metoda akuntansi, penjabaran kurs valuta asing, laba atau rugi operasi maupun non operasi, dan jenis-jenis informasi kegiatan perusahaan lain baik yang bersifat biasa maupun luar biasa. Keharusan mengungkapkan jenis-jenis informasi oleh BAPEPAM maupun oleh SAK tersebut disebut sebagai "Mandatory Disclosure." Mandatory Disclosure ini wajib dilakukan oleh perusahaan dalam

rangka melindungi para investor maupun kreditur dari praktek menyembunyikan informasi oleh manajemen perusahaan publik yang sering terjadi di Pasar Modal.

Prinsip keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh BAPEPAM sebenarnya merupakan bagian dari upaya penegakan *good corporate governance*. Empat prinsip yang melandasi *good corporate governance* adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan dan tanggung jawab. Pemenuhan empat prinsip tersebut hanya dapat dilakukan jika terdapat keterbukaan informasi, sehingga melandasi kewajiban full disclosure bagi perusahaan publik.

Perkembangan dunia usaha yang pesat ternyata membuat tuntutan atas kebutuhan informasi keuangan meningkat lebih jauh dari apa yang selama ini diungkapkan melalui *mandatory disclosure*. Bagi pihak emiten (perusahaan) selaku penyedia informasi laporan keuangan, jika hanya mengungkapkan informasi yang bersifat wajib dirasa masih kurang. Hal ini karena adanya tuntutan dari para *stakeholders* (investor dan pihak pemakailainnya) terhadap prinsip tanggung jawab sebagai bagian dari praktek *good corporate governance*. Prinsip ini menuntut tanggung jawab dan kontribusi perusahaan terhadap lingkungan eksternalnya. Untuk itu perlu disajikan juga informasi lain yang sifatnya sukarela atau "voluntary" dalam rangka memberikan informasi yang lebih lengkap kepada para pemakai laporan keuangan. Informasi yang bersifat "voluntary disclosure" ini berperan untuk melengkapi informasi yang bersifat "mandatory disclosure" yang diharapkan dapat meningkatkan kegunaan informasi dalam laporan keuangan. Contoh dari voluntary disclosure adalah pengungkapan informasi mengenai lokasi perusahaan, jumlah karyawan perusahaan, latar belakang atau riwayat hidup para pimpinan eksekutif serta informasi lain yang berhubungan dengan kegiatan atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Di Indonesia dengan adanya era globalisasi dan transparansi informasi, tentunya praktek *voluntary disclosure* dalam laporan keuangan perlu diteliti dalam rangka memperoleh bukti empiris, terutama tentang kegunaan informasi yang bersifat voluntary bagi para pemakai laporan keuangan. Praktek pengungkapan informasi yang selama ini dilakukan oleh perusahaan publik, jenis informasi yang diungkapkan dalam voluntary disclosure sangat beragam antar perusahaan. Pihak perusahaan sebagai penyaji laporan keuangan lebih mempertimbangkan tingkat